



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA  
KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- : 14 (empat belas)  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Dengan : Gubernur Bank Indonesia  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Kamis, 14 November 2019  
Waktu : 16.00 WIB s.d 17.40 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI  
Ketua Rapat : H. Dito Ganinduto, M.B.A.  
Sekretaris Rapat : Drs. Urip Soedjarwono  
Acara : Laporan Hasil Panja Penerimaan dan Pengeluaran RATBI  
Tahun 2020  
  
Hadir : GUBERNUR BANK INDONESIA (PERRY WARJIYO)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F-PG):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua,**  
*Shalom,*  
*Namo Budaya,*  
**Salam kebajikan.**

**Yang terhormat saudara Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya,**  
**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,**  
**Dan hadirin yang berbahagia.**

Menurut catatan yang kami terima dari Sekretariat Komisi XI DPR RI, daftar hadir telah ditandatangani oleh 40 Anggota yang terdiri dari 9 Fraksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, izinkanlah kami membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia dan rapat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 16.00 WIB)**

**Hadirin yang kami hormati.**

Mengawali Rapat Kerja hari ini, marilah kita bersama-sama membaca puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia dalam keadaan sehat wal'afiat. Sempga hal-hal yang akan kita bicarakan dan simpulkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Agenda Rapat Kerja kita pada hari ini adalah pengambilan keputusan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia Tahun 2020. Sebagaimana kita ketahui dalam rapat terdahulu Bank Indonesia pada tahun 2020 akan melaksanakan beberapa program strategis, antara lain:

1. Memperkuat efektifitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah;
2. Memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal dan reformasi structural, structural Pemerintah untuk mengelola defisit transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Memperkuat kebijakan dan survailance makro prudensial untuk turut memelihara stabilitas sistem keuangan;
4. Memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan makro prudential Bank Indonesia dan kebijakan dan pengawasan makro prudensial OJK untuk

- memelihara stabilitas sistem keuangan;
5. Memperkuat sistem pembayaran, pengelolaan uang Rupiah dan infrastruktur pasar keuangan untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital, serta tersedianya uang layak edar di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. Memperkuat sinergi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan Pemerintah dan OJK untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan digital;
  7. Mengekselerasi pendalaman pasar keuangan konvensional dan Syariah untuk memperkuat efektifitas transmisi kebijakan Bank Indonesia dan sumber pembiayaan ekonomi termasuk pembiayaan infrastruktur;
  8. Mengembangkan kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan kebijakan komite nasional keuangan Syariah dan pihak-pihak lainnya untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah;
  9. Memperkuat efektifitas kerja sama internasional untuk mendukung kebijakan utama BI dalam mencapai stabilitas marko ekonomi dan sistem keuangan serta memperjuangkan kepentingan BI dan/atau ekonomi Indonesia;
  10. Memperkuat organisasi proses kerja manajemen SDM dan fasilitas kerja untuk mendukung strategi Bank Indonesia;
  11. Membangun sistem informasi Bank Indonesia yang sesuai dengan era digital;
  12. Memperkuat tata kelola manajemen resiko dan kerangka hukum serta akuntabilitas dan sistem bilitas keuangan Bank Indonesia.

Terhadap 12 program strategis tersebut, baik terkait anggaran penerimaan maupun pengeluaran telah dilakukan pembahasan melalui Panitia Kerja Penerimaan dan Pengeluaran RATBI Tahun 2020 dan Panitia Kerja Pengeluaran RATBI 2020 pada hari Selasa, 12 November 2019 dan Rabu, 13 November 2019 kemarin.

Selanjutnya kami persilakan kepada masing-masing Ketua Panja untuk menyampaikan laporannya. Pertama, kami persilakan Ketua Panja Penerimaan RATBI 2020 untuk menyampaikan laporannya dan dilanjutkan dengan Pengeluaran RATBI tahun 2020. Tapi sebelumnya disini mungkin ada yang terhormat Wakil Ketua DPR RI Bapak Rahmat Gobel untuk memperkenalkan diri.

Silakan laporannya.

**F-P. GERINDRA (Ir. H. SOEPRİYATNO):**

Saya mewakili Bapak Amir Uskara Bapak Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,  
Dan hadirin sekalian yang berbahagia.**

Rapat Panitia Kerja Komisi XI DPR RI tentang Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia atau RATBI operasional tahun 2020 telah dilakukan pada hari Selasa sampai dengan Rabu, 12-13 November 2019. Dalam Panja tersebut, Bank Indonesia telah menyampaikan Rencana Anggaran Penerimaan Operasional Bank Indonesia tahun 2020 sebesar Rp31.994 miliar atau naik 17,84% dari RATBI tahun 2018. Postur rencana Anggaran Penerimaan Operasional Bank Indonesia tahun 2020 yang disampaikan tersebut terdiri atas:

1. Penerimaan hasil pengelolaan aset valas sebesar Rp31.880 miliar.

**F-P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):**

Interupsi Pimpinan.

Bisa tidak, kan kita ada dua Panja, Panja Penerimaan dan Panja Penerimaan. Kita tidak paham, tolong ditayangkan Pak.

Terima kasih.

**F-P. GERINDRA (Ir. H. SOEPRİYATNO):**

2. Penerimaan operasional kegiatan pendukung sebesar Rp23 miliar;
3. Penerimaan administrasi sebesar Rp84 miliar;

Setelah dilakukan pembahasan dan pendalaman terhadap Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2020, Panitia Kerja Penerimaan RATBI Operasional Komisi XI DPR RI bersama dengan Bank Indonesia, menyepakati penyusunan atas Rencana Anggaran Penerimaan Operasional Bank Indonesia Tahun 2020 menjadi sebesar Rp33.155 miliar atau naik 22,12% dari RATBI tahun 2019.

Adapun postur Rencana Anggaran Penerimaan Operasional Bank Indonesia tahun 2020, jika dibandingkan dengan RATBI tahun 2019 menjadi sebagai berikut:

1. Penerimaan pos hasil pengelolaan aset valas sebesar Rp33.048 miliar atau naik 22,28% dari ATBI tahun 2019. Adapun rinciannya sebagai berikut:
  - a. Bunga rekening giro, semula pada RATBI 2020 sebesar Rp47 miliar telah dilakukan penyesuaian menjadi Rp48 miliar.
  - b. Bunga deposito, yang semula dalam RATBI 2020 sebesar Rp839 miliar telah dilakukan penyesuaian menjadi Rp856 miliar.

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Interupsi Pimpinan.

Karena tadi tidak ditayangkan, tadi disebutkan 48 miliar atau triliun itu.

**F-P. GERINDRA (Ir. H. SOEPRIYATNO):**

Yang bunga rekening giro Rp48 miliar. Sebentar saya selesaikan dulu nanti baru dimasukkan disitu ya. Ini benar Rp48 miliar.

- c. Surat-surat berharga yang semua dalam RATBI 2020 sebesar Rp31.001 miliar telah dilakukan penyesuaian menjadi Rp32.144 miliar dari ATBI tahun 2019.
2. Penerimaan pos operasional pendukung sebesar Rp23 miliar atau turun 34,21% dari ATBI tahun 2019.
3. Penerimaan pos penerimaan administrasi sebesar Rp84 miliar atau turun sebesar Rp3,10% dari ATBI tahun 2019.

Jadi intinya adalah yang semula yang diusulkan oleh BI rencana anggaran operasional Bank Indonesia penerimaan Bank Indonesia tahun 2020 sebesar Rp31.994 miliar setelah kita bahas meningkat menjadi Rp33.155 miliar. Jadi bisa kita tingkatkan sebesar itu.

Terima kasih, saya begitu Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, demikianlah tadi laporan Panja Penerimaan Operasional yang telah disampaikan oleh Bapak Soepriyatno. Apakah dapat diterima, disetujui?  
Dari Bank Indonesia setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Panja Pengeluaran RATBI Tahun 2020 untuk menyampaikan laporannya.  
Bapak Hatari silakan.

**WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI/F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Laporan Rapat Panitia Kerja Komisi XI DPR RI tentang Rencana Anggaran Pengeluaran Anggaran Tahunan Bank Indonesia Tahun 2020.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):**

Interupsi Pimpinan.  
Saya minta sekali lagi tolong ditayangkan dong.

**WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI/F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Gangguan teknis sedikit tidak apa-apa, tidak ada pengaruh dengan ini.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,  
Hadirin sekalian yang kami hormati.**

Rapat Panitia Kerja Komisi XI DPR RI tentang Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia RATBI tahun 2020 dilakukan pada hari Selasa dan Rabu, 12-13 November 2019. Dalam Rapat Panja tersebut, Panja telah membuat keputusan kesimpulan untuk menyetujui anggaran pengeluaran operasional Bank Indonesia tahun 2020 sebesar Rp11.454.171.000.000,- atau naik 15,66% dibandingkan dengan ATBI 2019.

Rincian postur rencana anggaran pengeluaran operasional Bank Indonesia tahun 2020 yang telah disetujui Panja adalah sebagai berikut:

1. Gaji dan penghasilan lainnya dalam RATBI tahun 2020 sebesar Rp3.755.729.000.000,- atau naik 6,09% jika dibandingkan dengan ATBI tahun 2019.
2. Manajemen sumber daya manusia sebesar Rp2.247.814.000.000, atau naik 26,46% dibandingkan dengan ATBI tahun 2019.
3. Anggaran logistik sebesar Rp1.411.339.000.000,- atau naik 20,52% dibandingkan dengan ATBI tahun 2019.
4. Anggaran penyelenggaraan operasional kegiatan pendukung sebesar Rp1.290.780.000.000,- atau naik 9,01% dibandingkan dengan ATBI tahun 2019.
5. Program sosial Bank Indonesia dan pemberdayaan sektor riil dan UMKM sebesar Rp808 miliar atau naik 71,91% dibandingkan dengan ATBI tahun 2019.
6. Pajak sebesar sebesar Rp961.211.000.000,- atau turun 0,39% dibandingkan dengan ATBI tahun 2019.
7. Cadangan anggaran sebesar Rp279.370.000.000,- atau naik 15,44% jika dibandingkan dengan ATBI tahun 2019.

Dalam rapat Panja tersebut, juga mengemuka beberapa catatan yang diberikan oleh Pimpinan dan seluruh Anggota Panja Pengeluaran RATBI Tahun 2020 antara lain:

1. Agar pos-pos pengeluaran yang nilainya besar yang dilakukan oleh Bank Indonesia supaya benar-benar berdampak dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
2. Agar Bank Indonesia melaksanakan program strategi yang telah disampaikan kepada Panja Pengeluaran RATBI tahun 2020 dengan

sebaik-baiknya dan dapat diukur dengan indikator kinerja utama atau IKU yang telah disampaikan kepada Panja Pengeluaran RATBI Tahun 2020.

3. Dengan peningkatan pada pos program sosial Bank Indonesia dan pemberdayaan sektor riil dan UMKM sebesar 71,91% dibandingkan dengan ATBI tahun 2019. Panja Pengeluaran meminta agar Bank Indonesia supaya memisahkan pos anggaran tersebut menjadi dua bagian, yaitu:
  1. Pos anggaran sosial Bank Indonesia;
  2. Pos anggaran pemberdayaan sektor riil dan UMKM.
4. Agar Bank Indonesia melaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam hasil pemeriksaan BPK tahun 2019.

Demikian laporan Panitia Kerja Pengeluaran tentang Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2020. Kami berharap dalam Rapat Internal Komisi XI DPR RI hasil Panja Pengeluaran tentang Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2020 tersebut, dapat disetujui dan selanjutnya dilakukan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Bank Indonesia.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 14 November 2019

**Pimpinan Panitia Kerja Pengeluaran RATBI Tahun 2020 Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Tertanda Achmad Hatari dan Eriko Sotarduga

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami sampaikan Ketua Panja Pengeluaran RATBI Tahun 2020 Pak Achmad Hatari. Apakah Laporan Panja Pengeluaran RATBI Tahun 2020 dapat kita terima.

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Interupsi Pimpinan.

## **KETUA RAPAT:**

Silakan Bapak Andreas.

## **F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Saya hanya mengoreksi saja kemarin rapat Panja Pengeluaran yang point 5, itu sebetulnya kenaikannya bukan 71% karena jangan *apple to apple*, karena ada program khusus terutama untuk pemberdayaan UMKM di dalam mendukung program Pemerintah untuk memberdayakan UMKM kita. Jadi jangan sampai kemudian nanti kesannya ini karena tidak *apple to apple*. Jadi kita kemarin sudah remain itu sebetulnya jangan dianggap posnya disamakan, nanti ini akan menimbulkan masalah. Sebetulnya karena programnya pun juga ada diantaranya ada rencana untuk membuat program wirausaha muda dan seterusnya. Inikan tahun sebelumnya tidak ada, jadi bukan kenaikannya 71% ini ada program baru yang akan diwujudkan. Karena itu, supaya berjalan inikan posnya dipisah dua ini, jadi ini adalah program baru yang akan mulai diadakan di tahun ini. Jadi bukan 71%, jadi tolong dipisahkan.

Kemarin kita sudah memberikan catatan itu, supaya ini menurut saya sangat penting menyangkut karena bukan *apple to apple* itu. Dari tahun sebelumnya program ini tidak ada kemudian jadi ada, terus kemudian dimasukkan disitu. Jadi saya kira ini dikoreksi, jadi dipisahkan posnya dan tidak dibandingkan secara di tahun sebelumnya, karena ini adalah program baru yang akan dilakukan.

Terima kasih.

## **WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI/F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Bapak Andreas, artinya kesepakatan tadi malam tidak ada perubahan. Hanya dua komponen itu harus dipisahkan, sementara di dalam dokumen Bank Indonesia ini menjadi satu. Karena itu, Panja Pengeluaran melalui Bapak Andreas menganjurkan supaya dipisahkan antara sektor riil tersendiri dan UMKM tersendiri. Jadi ini juga kesalahan teknis nanti diperbaiki, tetapi pada prinsipnya hanya dituangkan dalam bentuk tulisan.

## **F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Artinya saya keberatan kalau dikatakan kenaikan 71%, itu pointnya bukan 71%. Karena itu akan sangat ini, saya keberatan kalau itu. Kita juga jagalah semuanya, karena memang tujuannya tidak sama seperti itu. Saya kira ini penting, karena ini menyangkut hal yang sangat penting. Kita ini kenapa memasukkan hal itu, karena Pemerintah ingin memberdayakan UMKM. Nah, disinilah sebenarnya kontribusi riil yang bisa BI juga ikut lakukan, itu pointnya.

Terima kasih.



## **KETUA RAPAT:**

Kita koreksi redaksional saja, mohon diperhatikan silakan dikoreksi, sambil dikoreksi Ibu Vera silakan.

## **F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## **Bapak Gubernur, Deputi dan seluruh jajarannya.**

Sebetulnya tadi saya juga ingin menanggapi mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Andreas, akan tetapi itu kita tunggu saja sambil dikoreksi. Namun, seiring dengan pembahasan yang sudah kita lakukan Panja-Panja kemarin. Luar biasa, tentunya kita ingin adanya perbaikan atau peningkatan terhadap ATBI khususnya kepada usulan yang tadi kita sampaikan bahwa ada penambahan program. Jadi imagenya jangan sampai ada naik 71% karena itu sesuatu yang baru dan terpisahkan.

Dan yang kedua Bapak Gubernur yang ingin kami dan seiring dengan jalannya pembahasan beberapa hari yang lalu kiranya mohon ini sepakat teman-teman kemarin juga kita bahas sekiranya perlu diberikan. Saya tidak tahu ini masuk kesimpulan atau kesimpulan secara besar. Bahwa perlu adanya format baku atau standart baku terhadap penyampaian data. Jangan nanti ketika pergantian Dewan Gubernur itu memulai lagi dari hal yang baru. Jadi saya sulit untuk meng-adjust darimana saya harus membahas awalnya. Kalau di Pemerintah memang cukup luas mereka mempunyai format mulai dari asumsi, RKP dan mulai nota keuangan, RKP, dan asumsi, masuk ke Panja.

Nah, oleh karena itu Pimpinan, kita perlu adakan komitmen bersama dengan Gubernur dan Komisi XI DPR RI untuk mempersingkat dan mempercepat dalam pembahasan. Jadi kami mohon kepada Bank Indonesia jangan sampai nanti terjadi yang kurang enak, ketika membahas baru kita minta data, baru di *provide*, itu untuk dihindari. Jadi ada standart baku siapapun nanti yang akan menjadi Gubernur atau Dewan Gubernur itu aturanya sudah seperti itu SOP-nya.

Itu saja dari saya, dan tentunya ada perlu ada percepatan pembahasan penyampaian RATBI-nya, sehingga kami juga tidak terlalu terburu-buru dalam pembahasan, kita sepakati. Karena ini memang berkaitan dengan RAPBN yang selalu bertabrakan. Tentunya saya pahami Gubernur Bank Indonesia menunggu terhadap keputusan suku bunga, maupun harga nilai tukar. Jadi memang coba dipikirkan sebaik mungkin bagaimana masuk siklus pembahasan itu agar kami juga tidak diberikan waktu yang cukup laung untuk melakukan pembahasan.

Tentunya kepada teman-teman di Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk ketika sudah disampaikan oleh Bank Indonesia di bulan Agustus misalnya, itu

maksimum ada batasan dimana kita mulai lakukan pembahasan. Jadi jangan ditunda juga kasihan mereka, mereka inikan juga harus konsolidasi ke daerah, ke kantor wilayah dan itu juga kita harus memberikan waktu.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Cukup jadi ya?

Bapak Misbakhun silakan.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):**

Pak Ketua, menarik yang disampaikan oleh Ibu Vera tadi mengenai term waktu penyampaian ATBI di rencana anggaran tahunannya. Kita kan punya siklus yang di APBN itu Mei biasanya Pemerintah menyampaikan mengenai pagu indikatifnya. Pagu indikatif setelah Mei selesai Pemerintah mempunyai nota keuangan dan dibacakan Presiden tanggal 16. Kemudian baru kita masuk siklus APBN sampai bulan Oktober.

Menarik kalau kita mulai membangun kesitu, walaupun ketentuan di dalam Undang-Undang harus disetujui 30 hari sebelum digunakan. Tadi sama yang disampaikan argumentasi oleh Bu Vera bahwa mereka harus melakukan sosialisasi ke daerah-daerah dan sebagainya. Saya berharap nanti mumpung ini masa sidang yang baru, Anggota DPR RI yang baru mungkin dikasih BI itu misalnya mungkin masa sidang bulan September-Oktober itu sudah selesai, mengajukannya bulan Agustus misalnya. Kita membangun tradisi baru ini, sehingga waktunya panjang, Agustus sampai Oktober kita membangun APBN juga, kita membahas ATBI juga. Sehingga pada saat itu kita bisa banyak diskusinya dengan situasi-situasi yang hampir sama pada saat kita mendiskusikan APBN.

Menurut saya kalau kita membangun tradisi ini, ini merupakan terobosan yang bagus sehingga kita memberikan ruang kepada Bank Indonesia untuk kemudian melakukan sosialisasi dan program kerjanya lebih dalam ke daerah-daerah.

Itu saja, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Usulan Ibu Vera dan usulan Bapak Misbakhun mungkin akan dikonsider oleh Bank Indonesia. Redaksionalnya sudah betul tadi, nomor 3 ya. Dengan peningkatan pada pos program sosial Bank Indonesia dan pemberdayaan sektor rill dan UMKM, Panja meminta agar Bank Indonesia memisahkan pos anggaran tersebut menjadi dua, yaitu pos anggaran program sosial Bank Indonesia dan b. pos anggaran

pemberdayaan sektor riil dan UMKM.

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Ini redaksinya coba kita juga minta masukan dari Bank Indonesia, sebenarnya bukan dengan peningkatan pada pos program ini, dengan adanya program baru. penekanannya harus disitu sebetulnya, karena bukan peningkatannya yang sehingga kemudian dipisah menjadi dua, akan tetapi karena ada program baru yang akan dilakukan untuk pemberdayaan UMKM.

**KETUA RAPAT:**

Oke, sebentar sebelum mungkin dari BI dari usulan Pak Gubernur.

**GUBERNUR BANK INDONESIA (PERRY WARJIYO):**

Kalau boleh Bapak Pimpinan, Bapak Ketua, lebih pendek itu kayaknya lebih enak. Jadi tidak usah ada kata pertimbangan, langsung saja “Panja meminta agar Bank Indonesia memindahkan pos itu menjadi dua”. Itu mungkin lebih mudah.

**KETUA RAPAT:**

Setuju, lebih cocok ya.

**GUBERNUR BANK INDONESIA (PERRY WARJIYO):**

Lebih singkat, lebih mudah, lebih enak.

**F-PKS (Ir. H.A. JUNAIDI AULY, M.M.):**

Ketua, saran yang disampaikan Bapak Andreas itu kemarin sudah disampaikan pada saat Panja. Artinya, BI juga sudah mendengar itu, kalau memang BI juga sudah ada angkanya masing-masing pos itu lebih baik disebut angkanya mungkin kalau memang sudah ada angkanya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Angkanya kan ada dikesimpulan nanti mungkin. Cukup dikesimpulan saja angkanya atau disini.

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Di point 5 itu yang tadi pos-posnya itu coba, ini tinggal disesuaikan saja.

**KETUA RAPAT:**

Kan sudah ada itu angkanya, oke setuju ya.

Jadi laporan Panja Pengeluaran dapat kita terima?

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik, demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama dan kita setuju bersama Laporan Panja Penerimaan dan Panja Pengeluaran RATBI Tahun 2020. Untuk selanjutnya kami persilakan Gubernur Bank Indonesia untuk memberikan penjelasan.

**GUBERNUR BANK INDONESIA (PERRY WARJIYO):**

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**Salam sejahtera untuk kita semua,**

*Om Swasti Astu,*

*Namo budaya,*

**Salam kebajikan.**

**Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.**

Terima kasih tentu saja hasil pembahasan kemarin dari rapat sebelumnya dan juga Panja kami mendengar, meskipun kami juga tidak ikut dalam Panja tetapi setiap detik kawan-kawan melaporkan kepada kami. Buktinya kami pun dalam rangka ISEP kami terus memantau dan kami senang sekali bahwa Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan sekalian. bahwa masukan-masukan, pandangan-pandangan dewan itu kami lihat itu adalah keseriusan, ketulusan untuk kami bersama Bapak dan Ibu untuk bermitra bagaimana sama-sama kita tidak hanya melaksanakan tugas-tugas baru tetapi juga sama-sama untuk memajukan ekonomi kita.

*Insyallah* tadi masukan-masukan yang tadi disimpulkan dalam rapat termasuk juga pandangan yang disampaikan dalam sidang ini *insyallah* menjadi juga masukan kami untuk nanti kita bermitra bersama kedepan.

Barangkali itu yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, kita langsung masuk ke kesimpulan.

Silakan Sekretariat kesimpulannya ditayangkan.

Kesimpulan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia tentang Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2020, Masa Sidang I Tahun 2019-2020, Kamis 14 November 2019.

1. Komisi XI DPR RI menyetujui Rencana Anggaran Penerimaan Bank Indonesia Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp33.048 miliar dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Hasil pengelolaan aset valas sebesar Rp33.048 miliar;
  - b. Operasional kegiatan pendukung sebesar Rp23 miliar;
  - c. Penerimaan administrasi sebesar Rp84 miliar.
  
2. Komisi XI DPR RI menyetujui Rencana Anggaran Pengeluaran Bank Indonesia tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.454 miliar dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Gaji dan penghasilan lainnya sebesar Rp3.755 miliar.
  - b. Manajemen Sumber Daya Manusia sebesar Rp2.947 miliar.
  - c. Logistik sebesar Rp1.411 miliar.
  - d. Penyelenggara unoperasional kegiatan pendukung sebesar Rp1.290 miliar.
  - e. Program sosial Bank Indonesia dan pemberdayaan sektor riil dan UKM sebesar Rp808 miliar.
  - f. Pajak sebesar Rp961 miliar. Cadangan anggaran sebesar Rp279 miliar.

Apakah dapat diterima?

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Yang E itu tidak bisa dipecah itu, ada pecahannya tidak? Karena tadi malam kita minta sebenarnya dipecah kan itu.

**KETUA RAPAT:**

Perlu dipecah tidak? Saya kira tidak usah.

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Kalau tidak dikurung saja untuk dipecah jadi dua gitu.

**KETUA RAPAT:**

Tidak usah ya, kan sudah jelas angkanya.

**F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Dalam kurung saja.

**KETUA RAPAT:**

Dalam kurungnya apa Pak Andreas?  
Saya kira cukup Pak, sudah betul itu jadinya ya.  
Komisi XI DPR RI setuju?  
Dari Pemerintah setuju?

**F-PDIP (DOLFIE, O.F.P.):**

Sebentar Pak, nomor 3 tidak ada kesimpulannya, cuma dua?

**KETUA RAPAT:**

Tidak ada lagi, cuma 2.

**F-PDIP (DOLFIE, O.F.P.):**

Boleh usul satu kesimpulan Pimpinan.  
Ijin Pimpinan, terima kasih Pimpinan.

Bapak Gubernur, kalau boleh menambahkan satu kesimpulan agar Bank In menyiapkan untuk ATBI yang berikutnya Pak. KPI per Dewan Gubernur Pak, karena bagaimana pun Dewan Gubernur kan ada pembagian tugas. Karyawan Bapak saja ada KPI, masa Dewan Gubernur tidak ada. Jadi mohon bisa dicantumkan dalam kesimpulan untuk yang berikutnya sudah disiapkan oleh Gubernur Bank Indonesia.

Terima kasih.

**F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi Pak Ketua.

Inikan sudah kita putuskan, tidak mungkin lagi masuk konsep di Panja. Konsekuensilah jadi yang sudah kita putuskan kita putuskan saja, itu kalau dari saya Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Makanya saya pikir kita kan sekarang bicara hasil laporan Panja Penerimaan dan Panja Pengeluaran RATBI Tahun 2020 yang kita lakukan 2 hari yang lalu. Mungkin ini Bapak Dolfie mungkin ini kita masukkan dalam Rapat Kinerja Pengawasan saja.

Setuju ya Bapak Gubernur? Maka nomor 3 kita drop saja.

Dengan demikian Laporan Panja Penerimaan dan Penja Pengeluaran RATBI Tahun 2020 dapat kita terima.

Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

**F-PPP (Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd.):**

Saya sedikit ada pernyataan sikap, ini mumpung ada Bapak Gubernur disini.

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Pimpinan Komisi XI DPR RI yang kami hormati,  
Dan Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya.**

Saya pada forum yang terhormat ini menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas terselenggaranya ISEP ke-VI 2019. Berdasarkan pidato Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma'ruf Amin dalam acara Indonesia Syariah Economic Festival ke-VI tahun 2019 yang dilakukan oleh BI, maka ada 4 hal yang kami tarik kesimpulan.

1. Indonesia harus menjadi produsen produk halal, bila perlu kita ekspor ke berbagai negara.
2. Pengembangan dan perluasan industry keuangan Syariah.
3. Pengembangan dan perluasan dana sosial Syariah dalam bentuk wakaf dan zakat dan lain-lain.
4. Pengembangan dan perluasan kegiatan ekonomi Syariah atau bisnis Syariah.

Kemudian Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia juga berharap:

1. Semua pihak yang terkait bekerja sama secara erat mengembangkan ekonomi Syariah di Indonesia.
2. Ekonomi dan keuangan Syariah harus menjadi pendorong terjadinya arus baru ekonomi di Indonesia.

Oleh karena itu, ISEF ke-VI 2019 merupakan platform pertama yang secara komprehensif dapat mengintegrasikan seluruh komponen utama penggerak sektor ekonomi dan keuangan Syariah, baik skala domestic maupun internasional.

Maka saya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut dan saya berharap kepada BI dan maupun Pemerintah Pusat dapat melibatkan pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia, wabil khusus di Nusa Tenggara Barat. Mengingat pondok-pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat berkontribusi menaikkan IPM NTB. Dan juga perlu ditingkatkan adalah UMKM berbasis Syariah di pondok-pondok

pesantren.

Sesuai dengan 12 program strategis BI 2020 yang nomor 8, yaitu mengembangkan kebijakan BI yang bersinergi dengan Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS dan pihak lainnya untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah. Dengan tujuan mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan Syariah dunia, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif berkelanjutan melalui sinergi kebijakan BI dan otoritas serta mitra strategis lainnya.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya juga mengapresiasi bahwa Indonesia dinobatkan menjadi nomor satu pada global muslim travel indeks 2019. Karena mempunyai 5 destinasi halal atau wisata halal yang terbaik di dunia, 2019. Di mana salah satu diantaranya adalah Lombok dengan nilai point 70 naik 2 point dari tahun sebelumnya. Di samping itu ada Aceh, Kepulauan Riau, Jakarta dan Sumatera Barat.

Pada kesempatan ini, kami mengusulkan kedepan Bapak Gubernur BI agar apa yang diharapkan oleh Bapak Wakil Presiden itu di *break down* kebawah. Usulan saya kedepan, yaitu bagaimana menjadikan Lombok menjadi salah satu Lombok Economic Syariah Festival agar betul-betul wilayah itu yang mendapat destinasi halal dunia itu menjadi penghargaan yang provinsi yang bersangkutan.

Saya kira ini saja dari saya Bapak Gubernur, terima kasih atas kesempatan ini.

*Wallahu Muwafiq Ila Aqwamithariq,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

**Bapak Gubernur beserta jajarannya,  
Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.**

Dengan selesai pembacaan dan persetujuan rancangan kesimpulan tersebut, maka acara Rapat Kerja yang telah kita mulai pada sore hari ini dapat kita selesaikan. Sebelum kita tutup kami persilakan ada closing statement dari Bapak Gubernur.

#### **GUBERNUR BANK INDONESIA (PERRY WARJIYO):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat yang telah menyetujui anggaran tahunan Bank Indonesia untuk tahun 2020. Kami mencermati betul pandangan dan arahan dari Dewan dan itu akan Insya Allah kami akan lakukan untuk perbaikan atau kemajuan kita bersama.

Nomor dua, kami juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Bapak-



bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang memenuhi undangan kami dalam pembukaan ISEF Ke-VI kemarin di JCC itu menunjukkan bahwa anggaran yang Bapak dan Ibu setuju, itu memang betul-betul kami manfaatkan untuk memajukan ekonomi kita termasuk kemarin dalam penyelenggaraan ISEF yang didahului oleh 3 kali di Sumatera wilayah timur, maupun di Jawa.

Pada kesempatan ini kami juga mengundang Bapak dan Ibu sekalian, nanti pada acara pertemuan tahunan Bank Indonesia, yang *insya allah* akan dilakukan tanggal 28 November 2019 dan akan dihadiri oleh Bapak Presiden. Di mana pada waktu itu kami akan berkesempatan untuk mengevaluasi tahun 2019 dan juga kebijakan-kebijakan kami di tahun 2020. Dan sekaligus itu juga menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, baik dalam pertemuan sebelumnya maupun di dalam Panja.

Banyak event-event yang tentu saja itu wujud dari apa yang Bapak dan Ibu setuju dalam anggaran ini dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk kemajuan dan kepentingan rakyat.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Jadi kami hadir di acara ISEF kemarin itu acara yang luar biasa, kami memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bank Indonesia. Dengan demikian, dengan mengucapkan *hamdallah* Rapat Kerja pada sore hari ini saya tutup.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.40 WIB)**

**Jakarta, 14 November 2019**

**a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat**

**ttd**

**Drs. Urip Soedjarwono  
NIP. 19620521 198203 1 001**